

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 1, Juli - Desember 2008

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Jl. Johari I No. 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240

Tel: (021) 726 2908 E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •
Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •
Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •
Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Pengantar	5-9

SAJIAN KHUSUS

Kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi: Suatu Percobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam <i>Nurcholish Madjid</i>	13-46
Kalam Kekhalifahan Nurcholish Madjid <i>Mujiburrahman</i>	47-67
Kekhalifahan dan Tanggung Jawab Global: Menimba Inspirasi dari Mata Air Warisan Nurcholish Madjid <i>Yunasril Ali</i>	69-85

ARTIKEL

Menampilkan Agama Berwajah Ramah <i>Kautsar Azhari Noer</i>	89-114
Rekonstruksi Toleransi: Dari Toleransi sebagai <i>Modus Vivendi</i> menuju <i>Value</i> <i>Zuhairi Misrawi</i>	115-124

DAFTAR ISI

Hak-hak Minoritas, Negara dan Regulasi Agama <i>Ismatu Ropi</i>	125-138
Multikulturalisme vs <i>Nation-State</i> <i>Abdul Hadi W.M.</i>	139-160
Agama dan Kebangsaan: Mewujudkan Misi Profetik dalam Kehidupan Publik <i>Yudi Latif</i>	161-174
Pembaruan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid dan Isu-isu Gender <i>Budhy Munawar-Rachman</i>	175-188
Membuat Hidup Bermakna <i>Sri Dalai Lama Keempat-belas</i>	189-192

RESENSI BUKU

Ahl al-Kitāb: Sejarah yang Terlupakan <i>Zuhairi Misrawi</i>	195-199
---	---------

MULTIKULTURALISME VS NATION-STATE

Abdul Hadi W.M.

Marilah kita biasakan mendengar suara-suara yang lain
Kebenaran tidak hanya ada di Barat, bahkan Barat tanpa Timur
dan Islam

Akan timpang dan terus menerus pamer kepongahan dan
ketakadilan

Juga dalam bidang filsafat dan kearifan

(Proletar Religius)

Semboyan negara kita ialah Bhineka Tunggal Ika. Ini merupakan pengakuan terhadap kenyataan sosial antropologis penduduk negeri ini yang multi-etnik, multi-budaya, dan multi-agama. Ini juga merupakan pengakuan terhadap kenyataan sosial historisnya bahwa meskipun penduduk negeri ini bhineka, dalam perjalanan sejarahnya telah sejak lama saling berinteraksi dan mempengaruhi, bahkan memiliki ikatan yang disebabkan oleh faktor-faktor politik dan keagamaan, serta persamaan nasib selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, yang membawanya ke arah persatuan. Lagi pula sebagian besar etnik yang bhineka itu berasal dari rumpun yang sama, yaitu Melayu Mongoloid, demikian juga berbagai bahasa dan dialek yang digunakan termasuk ke dalam rumpun yang sama, yaitu rumpun bahasa-bahasa Austronesia. Ini berbeda misalnya dengan keragaman etnik yang terdapat di negeri-negeri seperti Amerika Utara, Australia, dan bahkan Malaysia yang tidak

berasal dari satu rumpun ras atau memiliki hubungan keagamaan satu dengan yang lain.

Walaupun dalam pelaksanaannya mengalami banyak rintangan dan tidak jarang pemerintah sendiri mengabaikan kenyataan-kenyataan tersebut, namun semangat yang lahir dari semboyan itu masih tetap hidup dan meresap dalam jiwa masyarakat kita. Sebagai cita-cita dan gagasan pula, tidak ada yang cacat dan cela dalam semboyan itu. Negara kita adalah unik dalam sejarah negara modern, karena pada mulanya munculnya negara modern didasarkan atas ide monokultural, sebagaimana tampak pada negara-negara di Eropa dan Amerika Utara. Sebaliknya negara-negara modern di Asia dan Afrika yang didirikan pasca Perang Dunia II seperti India dan Indonesia kebanyakan bercorak multikultural. Oleh karena itu sangatlah mengherankan bahwa gagasan multikulturalisme, yang dewasa ini banyak diperdebatkan di negara-negara Barat, muncul pula menjadi wacana yang ramai diperdebatkan di negara-negara yang pada dasarnya sudah multikultural seperti Indonesia.

Harus diakui bahwa asumsi dan argumensi yang diajukan oleh para penganjur gerakan ini sering mengejutkan dan menarik perhatian, akan tetapi jika dilihat dari perspektif sejarah Indonesia kehadiran multikulturalisme itu sebenarnya dapat dikatakan ahistoris atau memotong sejarah. Kecuali itu jika ia benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan politik seperti di Australia dan Canada, negeri asal gerakan ini, ia akan menimbulkan konsekuensi yang mungkin tidak terbayangkan oleh penganjurnya itu sendiri. Namun untuk dapat membayangkan dampak yang ditimbulkannya adalah tidak mungkin apabila mengetahui apa yang dimaksud multikulturalisme oleh para penganjur dan pendukungnya, maupun tanggapan para penentangannya di negara-negara yang mulai melaksanakan kebijakan multikultural dan merasakan akibat-akibatnya.

Multikulturalisme lahir pada awal 1970-an, ketika mulai muncul gerakan intelektual yang menamakan diri “gerakan multikultural” di Australia, Kanada dan Amerika Serikat. Meskipun pada mulanya merupakan gerakan kultural dan intelektual, dalam waktu yang tidak lama multikulturalisme berkembang menjadi gerakan

politik yang salah satu agendanya ialah mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap kaum minoritas, khususnya kaum imigran yang terutama sekali berdatangan dari Asia Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Kaum minoritas yang hadir sebagai muhajirin baru ini bukan saja multi-etnik dan multi-budaya, tetapi juga multi-ras dan multi-agama, yang dalam banyak hal tidak ada sangkut pautnya dengan bangsa, agama dan budaya dominan yang telah ada sejak lama di negara-negara tersebut.

Dalam dasawarsa 1980-an gerakan multikultural berkembang di Eropa dan mulai mempengaruhi kebijakan politik pemerintah setempat. Di Perancis, misalnya, ia mengusung agenda politik yang sama dengan agenda yang diperjuangkan di Kanada dan Amerika Serikat. Padahal, seperti banyak diketahui, Perancis merupakan negara Barat yang paling gigih mempertahankan gagasan *unikultural* dan *nation-state*, dan telah lama menolak gagasan multikultural. Faktor yang mendorongnya sangat menarik, yaitu hadirnya kaum imigran dalam jumlah besar dari Turki, dan negara-negara bekas jajahan Perancis seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Pesatnya pertumbuhan ekonomi negeri itu pada permulaan era pasar bebas atau neo-liberalisme, banyaknya lapangan kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh penduduk negeri itu, mendorong hadirnya jumlah besar imigran dari negara-negara yang penduduknya beragama Islam itu.

Multikulturalisme

Multikulturalisme lahir sekitar awal 1970-an di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika. Latar belakang sejarah yang mendorong kelahirannya, dan kebijakan yang ditempuh oleh gerakan-gerakan multikultural di negara-negara tersebut juga berbeda. Karena kondisi multikultural yang dihadapi juga berbeda, maka respons terhadap multikulturalisme juga berbeda di negara yang satu dengan di negara yang lain. Indonesia sejak lama merupakan negara yang masyarakatnya adalah plural dan multikultural.

Pengakuan akan kebhinnekaan budaya dan kemajemukan itu tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi mengapa kita masih mempersoalkannya sekarang? Apa perbedaan dan kemiripan antara kenyataan multikultural masyarakat Indonesia dan negara-negara lain? Sebagai bahan perbandingan, baiklah kita kupas dulu realitasnya di negara lain yang sebenarnya juga sudah lama mengenal kebhinnekaan budaya dan kemajemukan etnis. Kita mulai dengan pembicaraan tentang munculnya gerakan multikultural di Amerika.

Menurut Peter L. Wilson (1998) di Amerika gerakan ini berawal dari kegagalan pemerintah Amerika Serikat untuk mengintegrasikan dan memadukan kebudayaan orang Negro dan Indian, juga kaum imigran lain yang banyak berdatangan di Amerika Serikat pasca Perang Arab-Israel 1973, Perang Vietnam 1975, Perang Teluk 1991, Perang Dingin 1990, dan peristiwa-peristiwa lain di dunia baik di Afrika, Amerika Latin dan Asia.

Sampai akhir tahun 1960-an, apalagi pada 1970-an, gelombang penolakan terhadap budaya non-kulit putih yang aneka ragam itu menemui kenyataan getir. Kebijakan memadukan budaya yang bhinneka itu dengan budaya *mainstream* sepenuhnya gagal. Asimilasi dan integrasi ternyata tidak mungkin disebabkan faktor-faktor internal dalam budaya Anglo-Saxon yang didasarkan atas Protestanisme. Malahan upaya tersebut menghadapi perlawanan yang sengit. Upaya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai *melting pot* hanya merupakan sebuah utopia. Kebudayaan Orang Hitam dan pendatang Muslim dari Timur Tengah tidak akan sepenuhnya terpadukan dengan kebudayaan Orang Putih. Selain persoalan bias ras dan budaya di kalangan penduduk kulit putih, persoalan agama juga menjadi hambatan besar. Dengan demikian konsensus berada di ambang bahaya.

Golongan kanan dengan sikap *schizophrenia*-nya terhadap ras dan budaya lain, mengalami frustrasi, serupa dengan sekelompok orang di Indonesia yang antipati dan fobi terhadap orang Islam, dan kebudayaan masyarakat penganutnya. Kegagalan tersebut mendorong lahirnya konsensus baru, yang dinamakan "konsensus

neo-liberal”. Jadi hampir bersamaan waktunya dengan dicetuskan *neo-liberalisme* di bidang ekonomi ketika Amerika Serikat dan Inggris berada di bawah pemerintahan Ronald Reagan dan Margaret Thatcher (1979). Konsensus baru inilah yang kemudian yang dikenal sebagai multikulturalisme. Ini merupakan strategi baru untuk melindungi kepentingan global dua negara adidaya tersebut. Dengan konsensus baru tersebut, dan kebijakan neo-liberalisme dalam bidang ekonomi, keduanya dapat tetap mempertahankan hegemoninya secara ideologis dalam bidang ekonomi, politik dan budaya.

Ini dapat ditelusuri dalam tulisan-tulisan penentang multikulturalisme. Salah satunya ialah tulisan Kenan Malik “Against Multiculturalism” (1998). Kenan Malik mengatakan bahwa multikulturalisme sebenarnya merupakan buah dari kegagalan politik beruntun yang dialami negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa. Berakhirnya Perang Dingin, ambruknya gerakan-gerakan kiri (Neo-Marxis, New Leftis, dll), gagalnya berbagai gerakan pembebasan termasuk Teologi Pembebasan, dan redupnya berbagai gerakan sosial di Eropa, telah menciptakan kesadaran baru yang ditransformasikan ke dalam bentuk yang disebut multikulturalisme. Sementara itu tuntutan akan penyeteraan dan perlakuan yang sama terhadap masyarakat yang budayanya berbeda di negara-negara Barat semakin meningkat dan meluas. Dalam kampanyenya gerakan ini mengibarkan bendera *equalitas* dan menentang kebijakan monokultural yang berlaku di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Di antara slogan yang disuarakan secara lantang, ialah “*We live in diverse world, enjoy it*”. Nancy Fraser, seorang tokoh gerakan multikultural, mengatakan lebih kurang, “*The remedy required to redress injustice will be cultural recognition as opposed to political economic redistribution*”. (“Jalan keluarnya menghapus ketidakadilan itu ialah dengan mengakui kebhinekaan budaya”).

Tariq Modood, seorang penulis asal Pakistan di Inggris pada tahun 1990-an, membedakan antara “*equality of individualism*” dan “*equality encompassing public ethnicity*”. Menurutny keadilan

dalam pelaksanaannya, penyetaraan dan persamaan tidak boleh mengabaikan asal-usul etnik, komunitas dan budaya seseorang. Semua itu harus dihargai dan dihormati. Ia harus koeksis dalam kehidupan masyarakat.

Asas-asas Multikulturalisme

Sebagai konsensus baru yang lahir dari kebijakan neo-liberal, menurut penganjurnya, multikulturalisme hendaknya tidak dipahami sebagai doktrin politik atau aliran falsafah yang di dalamnya terdapat teori tersendiri tentang kodrat manusia dan tempatnya di dunia. Di dalamnya tidak ada pandangan hidup (*way of life*) dan gambaran dunia (*weltanschauung*) serta sistem nilai tertentu sebagai pegangan pokok. Padahal justru ketiga hal ini yang membedakan kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lain. Menurut pendukung gerakan ini, terutama di Amerika Serikat, multikulturalisme mengandung tiga asas penting yang mempengaruhi arah pandang gerakan multikultural.

Pertama, manusia tumbuh dan besar dalam masyarakat yang memiliki tatanan adab dan budaya tertentu. Berdasarkan itu masyarakat mengorganisasikan kehidupan dan hubungan sosial dalam suatu tatanan tertentu di mana sistem nilai dan makna diterapkan dalam berbagai ungkapan dan simbol budaya. Ini tidak berarti manusia ditentukan semata-mata oleh budaya masyarakatnya di mana ia tumbuh dan besar, yaitu dalam arti tidak melampaui kategori-kategori pemikiran yang tumbuh dalam lingkungan kebudayaan masyarakatnya. Ini juga tidak berarti bahwa ia tidak mampu bersikap kritis dan mengevaluasi nilai-nilai dan sistem makna yang ada dalam kebudayaannya. Sekalipun bisa mengatasi kategori-kategori pemikiran dalam masyarakatnya dan mengevaluasi nilai serta sistem makna yang berlaku dalam budaya masyarakatnya, setiap orang pada dasarnya dibentuk oleh kebudayaan tertentu dan dipengaruhi olehnya.

(*Catatan*: Ini merupakan hal biasa dalam sejarah kebudayaan dan kemanusiaan. Hanya saja di negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika, khususnya di negara-negara bekas jajahan Eropa, hal tersebut banyak berlaku, terutama sejak proses modernisasi berjalan semasa diperkenalkannya pendidikan ala Barat oleh pemerintah kolonial. Sejak itu lahir sekelompok elite terpelajar yang kritis terhadap budaya dan tradisi masyarakatnya, dan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai budaya Barat ke dalam kebudayaan tradisional. Pasca kemerdekaan proses itu berlangsung terus dan kian intensif karena kelompok elite terpelajar ini tampil sebagai penguasa. Pengalaman Indonesia menunjukkan hal ini. Budaya daerah atau tradisional, yang dilapisi nilai-nilai dan pandangan hidup agama-agama besar seperti Hindu dan Islam, dari waktu ke waktu mengalami pengikisan dan pendangkalan. Tentu terdapat reaksi dan respons dari pendukung budaya-budaya tradisional dan budaya-budaya berdasarkan agama ini. Polemik Kebudayaan 1935-1941 adalah contoh paling awal dari perdebatan tentang arah kebudayaan itu. Begitu pula perdebatan tentang dimasukkannya kembali kalimat “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dalam sila pertama Pancasila).

Kedua, kebudayaan yang aneka ragam dan berbeda-beda itu memperlihatkan adanya visi dan sistem makna yang berbeda-beda tentang kehidupan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang elok dan yang tidak elok. Masing-masing mewujudkan kemampuan tertentu dalam menanggapi kondisi kehidupan dan memberikan perasaan tertentu dalam berhadapan dengan berbagai peristiwa dalam sejarah kemanusiaan. Tetapi menurut pendukung multikulturalisme, masing-masing kebudayaan itu memiliki keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Untuk itu diperlukan kebudayaan lain untuk memahami kehidupan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Dengan memahami kebudayaan lain, cakrawala pengenalan makna hidup bisa diperluas.

Suatu masyarakat perlu bantuan tradisi budaya lain dalam rangka memperluas cakrawala intelektual, mengembangkan etos kerja atau budaya politiknya. Dengan demikian ia akan mampu

menyelamatkan diri dari bahaya narsisis budaya, apalagi dalam dunia seperti sekarang di mana saling ketergantungan budaya tambah besar. (Asas ini yang paling banyak mendapat reaksi, terutama di Eropa, Cina, dan di kalangan masyarakat Muslim. Bangsa Eropa merasa bahwa kebudayaannya sangat unggul, tidak perlu mempelajari kebudayaan lain. Orang Islam telah lama mempelajari kebudayaan lain untuk memperkaya kebudayaannya, tidak merasa memerlukan multikulturalisme. Sejauh nilai-nilai dan pandangan hidup tidak mengalami perusakan sebagai dampak dari kebudayaan lain, umat Islam akan terus belajar dari kebudayaan lain untuk memperkaya budaya bangsanya)

Ketiga, setiap kebudayaan secara internal majemuk dan mencerminkan selalu terjadinya dialog berkelanjutan antara berbagai tradisi yang berbeda-beda. (*Catatan*: Ini pun sudah dialami orang Kristen, Hindu, Islam, dan lain-lain, sebagaimana juga dialami bangsa Eropa. Tetapi pada fase puncak kemantapan perkembangannya dialog itu harus dihentikan sementara untuk memperkuat proses internalisasi nilai-nilai yang tengah dikembangkan.)

Terjadinya dialog antarbudaya sepanjang sejarah tidak mengingkari kebenaran universal dan identitas suatu kebudayaan atau sub-budaya. Suatu kebudayaan tidak dapat menghargai kebudayaan lain tanpa menghargai kebhinekaan dalam dirinya sendiri dan dalam tradisi budaya lain. Dialog antartradisi dan budaya diperlukan, antara lain melalui pemikiran, perenungan, penelitian, penyebaran luasan dialog antarbudaya dan antar-agama.

Dilihat dari sudut pandang multikulturalisme, tidak ada doktrin politik dan ideologi yang secara penuh merepresentasikan kebenaran tentang kehidupan manusia. Liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme masing-masing merepresentasikan pandangan khusus tentang kehidupan. Pandangan-pandangan tersebut bersifat parsial dan sempit. Karena itu fundamentalisme keagamaan dalam Islam, Hindu, Kristen, dan lain-lain ditentang keras, walaupun pendukung apa yang disebut “fundamentalisme”, tidak akan pernah mengakui pandangannya sempit dan parsial.

Menurut penganjur multikulturalisme pula, agar manusia kreatif ia harus melakukan dalam diri dan dalam masyarakatnya dialog berkelanjutan antarbudaya. Pandangan ini semu dan dibuat-buat. Tidak hanya dialog seperti itu yang membuat masyarakat kreatif. Arnold Toynbee mengatakan bahwa suatu masyarakat atau bangsa tergerak untuk kreatif bila ada kehendak kuat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan kepadanya. Iqbal mengatakan bahwa suatu bangsa atau kaum akan kreatif jika memiliki tenaga pendorong dalam dirinya untuk mencapai cita-cita tinggi. Daya pendorong itu ialah cinta kepada kebenaran dan keuniversalan ajaran agama. Apa yang dikemukakan Toynbee dan Iqbal didasarkan atas pengalaman sejarah kemanusiaan di Barat maupun di Timur. Dialog atau interaksi budaya yang satu dengan lain, yang mengikuti penyebaran agama, adalah hal yang tidak bisa dielakkan, namun tidak selamanya membuahkan kreativitas.

Penentang Multikulturalisme

Para penentang multikulturalisme mempunyai argumentasi lain, terlebih setelah melihat pelaksanaannya. Bagi mereka, seperti dikatakan Peter Lamborn di Amerika, multikulturalisme merupakan “Strategi yang dirancang untuk menyelamatkan negara Barat, khususnya gagasan *nation-state*.” Multikulturalisme juga merupakan sistem pengawasan terhadap masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas budaya dan pemeluk kepercayaan agama yang bhineka.

Di Amerika Serikat dan Eropa, *nation-state* harus diselamatkan dari munculnya kaum pendatang yang membawa aneka budaya dan kepercayaan agama berbeda, telah mengancam eksistensi kebudayaan nasional dan nasionalisme. Ancaman konflik sosial dan disintegrasi mendorong negara-negara tertentu di Barat mengambil kebijakan multikulturalisme, walaupun harus mendapatkan reaksi dari masyarakat luas. Ancaman lain yang mendorong lahirnya multikulturalisme ialah ancaman terhadap liberalisme dan demokrasi,

dan dengan sendirinya terhadap kebijakan ekonomi *neo-liberalism*. Untuk itu diperlukan sistem pengawasan terhadap masyarakat multi-budaya, multi-etnik, multi-agama, dan multi-ras.

Sistem pengawasan masyarakat dijabarkan menjadi kebijakan. Masing-masing kebudayaan yang bhineka diperbolehkan berkembang dan hidup, tetapi dengan keharusan memangkas unsur-unsur identitas dan takaran kemandiriannya. Salah satu di antaranya melalui pendidikan. Karena itu sejak kebijakan multikultural dilaksanakan, beberapa universitas membuka Departemen Multikulturalisme. Setiap budaya minoritas mendapat tempat dalam kurikulum untuk dipelajari. Tetapi sayangnya di Indonesia pengajaran dan penelitian kebudayaan Islam, sejak lama telah dipangkas, khususnya sebagai dampak politik etis.

Di Amerika Serikat anak-anak kulit putih dipaksa mempelajari sejarah orang berkulit hitam dan budayanya. Sedangkan di Indonesia orang Islam mempelajari sejarah Eropa dan bangsa lain, tetapi diijaukan dari pengajaran sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, serta tradisi intelektualnya seperti kesusastraan dan seni Islam. Multikulturalisme di sini tampak sebagai bentuk konsensus dan kompromi baru. Kompromi dijadikan norma dan menjelma sebagai seperangkat norma yang bertujuan mempertahankan gagasan *nation-state* dan pengawasan sosial.

Sebagai sistem norma, anekaragam budaya dilebur dan di-baurkan dengan budaya *mainstream*, yaitu budaya sekular yang didasarkan atas norma neo-liberal yang dipandang paling universal. Konsekuensinya dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Sebagai sebuah konsensus neo-liberal, norma-normanya juga harus didasarkan atas norma-norma neo-liberal yang meliputi hal-hal seperti berikut: [a] Prinsip-prinsipnya didasarkan atas aksioma-aksioma rasionalistik Eropa. [b] Penilaian didasarkan atas saintisme dan neo-positivisme. [c] Kebijakan budaya ditentukan oleh "the ruling class".
- (2) Multikulturalisme menempatkan diri sebagai sumbu peradaban, sedangkan budaya-budaya lain yang anekaragam diletakkan di

pinggiran membentuk lingkaran yang mengitari sang sumbu, yaitu multikulturalisme. Dengan demikian budaya-budaya non-Barat yang tidak dilandasi asas-asas saintisme dan neo-positivisme, atau kesadaran “Budaya Pencerahan”, diberi ruang yang kecil untuk menghidupkan eksistensinya.

(*Catatan:* Dalam pandangan neo-liberal dan neo-positivisme, kebebasan adalah ketundukan masyarakat terhadap aturan-aturan masyarakat liberal. Agama memberi petunjuk melalui wahyu, tetapi yang diutamakan bagaimana memberi kemungkinan lebih luas terhadap kebudayaan yang tidak didasarkan pada wahyu, melainkan dicapai melalui ikhtiar akal budi manusia. Dipengaruhi oleh konsep ini kebudayaan atau *culture* didefinisikan sebagai tingkah laku yang dipelajari dari masyarakat liberal dan individualistik. Neo-positivisme, yang pandangan-pandangannya ditanamkan dalam ilmu-ilmu sosial, antropologi, sejarah, dan lain-lain memandang kebudayaan sebagai bersifat mekanistik murni. Kebudayaan adalah produk dari tingkah laku manusia. Dengan kata lain, kebudayaan tidak perlu dipelajari dari sejarah kebudayaan dan agama, tetapi melalui ilmu sosial, politik, antropologi, sejarah politik, dll. Ini pandangan yang sangat reduksionis terhadap kebudayaan. Timbul anggapan dalam masyarakat neo-liberal bahwa kebudayaan sebenarnya bebas nilai dan berada di luar kode etik dan moral apa pun. Karena itu, kebudayaan harus dikosongkan dari nilai-nilai agama dan moral. Begitulah kebudayaan ditakrif sebagai himpunan tindakan, reaksi dan tingkah laku, atau sebuah kompleks dari berbagai kegiatan manusia seperti seni, sastra, ilmu, falsafah, politik, dls, bahkan gaya dan pola hidup serta bentuk-bentuk aktivitas manusia secara keseluruhan).

Dalam Islam, pengertian kebudayaan bukan itu. Semua itu hanya produk akhir dari kebudayaan yang juga disebut peradaban. Kebudayaan adalah bangunan batin peradaban yang terdiri dari pandangan hidup (*way of life*), kerangka nilai, dan gambaran dunia (*weltanschauung*) yang hidup dalam pikiran atau jiwa masyarakat. Kebudayaan dipandang juga sebagai cara berpikir, sikap mental dan

falsafah hidup yang dihayati oleh suatu masyarakat dan mempersatukan gerak dan cita-cita masyarakat tersebut.

Karena asumsi dasarnya yang lemah itu, maka dewasa ini wacana multikulturalisme, sebagaimana wacana pluralisme, lebih merupakan monolog dibanding dialog. Tidak jarang ia dipaksakan sebagai kebijakan yang paling benar dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang majemuk. Akibatnya multikulturalisme tampil seolah-olah sebagai paham “universalisme baru” (*neo-universalism*) yang cenderung “totaliter”. Ia terkait langsung dengan gagasan Pasar Global, Late Capitalism atau Neo-Liberalism, the End of History, dan Post-Modernism, bahkan dengan Post-Milleniarism, yang didasarkan pada Apokaliptisisme Yahudi-Kristen.

Perspektif Lain

Dilihat dari sudut pandang lain, multikulturalisme juga merupakan bentuk kompromi antara rasionalisme atau modernisme kanan dan postmodernisme yang semula ditentangnya. Seperti halnya neo-liberalisme, postmodernisme dijadikan kendaraan untuk mempertahankan norma-norma universal rasionalis (rasionalisme Pencerahan) menghadapi serangan dari fundamentalisme keagamaan dan kebudayaan non-Barat yang juga mulai berkembang. Belakangan postmodernisme juga melawan bangkitnya kembali gerakan kiri di Amerika Latin.

Postmodernisme dan neo-liberalisme berdampak besar dalam kehidupan kita. Cita-cita menyeragamkan pola dan gaya hidup manusia mulai tercapai, setidaknya-tidaknya di kota-kota besar. Postmodernisme memperderas arus relativisasi nilai-nilai dan despiritualisasi manusia. Neo-liberalisme, yang berusaha menarik umat manusia ke pasar bebas menjadi pecandu barang-barang konsumsi, memperparah pendangkalan budaya dan membuat kian seragamnya pola dan gaya hidup manusia.

Sejak 1960-an manusia di Barat dan kota-kota besar lain di dunia dipandang telah meninggalkan alam modern. Perubahan

itu ditandai dengan redupnya ideologi dan beberapa paham yang lahir dari rasionalisme, neo-positivisme dan ideologi seperti sosialisme, idealisme, patriotisme, dan lain-lain. Perubahan itu memiliki empat ciri. (1) Manusia sebagai subjek telah mati, seperti dikatakan Foucault. Individu tak memiliki kesadaran utuh, tidak memiliki tuntutan akan kebenaran. Kehidupannya dikuasai retorika mental dan sandiwara kata-kata. Manusia hanya berwacana, tanpa tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. (2) Penafian terhadap realitas. Realitas adalah fiksi yang diciptakan oleh imajinasi manusia. Boudrillard (1983) melukiskan bahwa realitas hanya *simulacra* yaitu citraan-citraan tanpa hakikat asasi. Citraan-citraan ini dihamburkan kepada manusia di seluruh dunia melalui media informasi. Jika realitas tidak ada, maka yang ada hanya timbunan citraan atau simulasi yang tidak bermakna. (3) Nihilisme menguasai jiwa manusia, perasaan bahwa segalanya tidak bermakna. Nilai-nilai mengalami keruntuhan. Manusia hanya benda yang digerakkan oleh kesadaran yang tidak utuh, berserak-serak. Apa yang dilakukan tidak merupakan kehendaknya. Satu-satunya makna ialah makna yang diberikan setiap orang dengan cara berbeda-beda sesuai tuntutan keadaan. (4) Penolakan naratif besar dan penafian kebenaran universal. Di antara naratif besar yang ditolak ialah “pembebasan manusia dari mitos” dengan mengerahkan seluruh daya akalinya dalam meraih kebenaran.

Multikulturalisme dan *Nation-State*

Kita telah mengetahui bahwa multikulturalisme bertentangan dengan “monokulturalisme” yang secara historis berarti norma-norma yang berlaku dalam sebuah negara bangsa. Dalam monokulturalisme terdapat kesatuan kultural yang normatif dan menjamin homogenitas budaya tersebut. Kebudayaan identik dengan bangsa, dibebaskan dari kepentingan politik praktis dan pencemaran komersialisasi. Sepanjang sejarah monokulturalisme menjamin keutuhan *nation-state*, khususnya di Eropa.

Karena multikulturalisme dalam pelaksanaannya mengancam gagasan *nation-state*, beberapa negara Eropa seperti Denmark, Belanda, Inggris, Jerman, dan Perancis mulai mengubah kebijakan multikultural mereka. Penentang multikulturalisme beranggapan bahwa kebijakan itu bisa mendorong timbulnya “ghetto-ghetto budaya” dan merusak identitas nasional dan bangsa itu sendiri. Di Eropa bahkan multikulturalisme sering dipandang sebagai konspirasi untuk mempercepat proses Islamisasi Eropa.

Di antara kebijakan multikultural yang ditentang ialah: (1) pengakuan kewarganegaraan ganda, yang sering merupakan akibat dari hukum yang berlaku di negeri tempat asal imigran; (2) dukungan pemerintah terhadap penerbitan surat kabar menggunakan bahasa minoritas, begitu terhadap siaran televisi dan radio; (3) dukungan terhadap festival, perayaan dan hari libur kaum minoritas; (4) diperbolehkannya pelajar atau mahasiswa menggunakan pakaian tradisional dan keagamaan tertentu di sekolah, dalam masyarakat dan organisasi militer; (5) dukungan untuk menghidupkan seni dan musik dari budaya minoritas; dan (6) dihidupkannya program yang memberi kaum minoritas berperan aktif dalam lapangan politik, pendidikan, dan kemasyarakatan yang lain.

Bagaimana dengan di Indonesia? Jika yang dimaksudkan dengan kebijakan multikultural adalah seperti yang dilakukan di Eropa, di Indonesia kita sudah melaksanakannya. Masalahnya, sejak lama masyarakat kita telah tercerabut dari akarnya dan keanekaragaman yang dimilikinya telah tersisihkan setidak-tidaknya oleh dua hal: (1) kebijakan penyeragaman yang dilakukan Orde Baru dan (2) globalisasi dan ekspansi pasar bebas, dengan dukungan efektif media massa atau media elektronik serta pelaku pasar, yang mendorong proses penyeragaman itu semakin menjadi-jadi.

Kebhinekaan budaya kita tinggal sebagai puing-puing di tengah maraknya tayangan film Hollywood, Bollywood dan Mandarin. Jangankan bahasa-bahasa daerah, bahasa Indonesia memiliki kedudukan politik yang lebih kuat saja sudah berantakan dan tidak berdaya menghadapi status terhormat bahasa Inggris, bahkan bahasa Mandarin.

Sebagai dampak dari globalisasi dan ekspansi pasar bebas, yang berkembang adalah budaya populer dan hedonistik. Di mana-mana sebagai dampaknya terjadi pendangkalan budaya dan penghayatan agama, dan menurunnya kecerdasan bangsa kita dalam merespons perkembangan mutakhir dunia. Kita terpuruk dalam ekonomi. Politik carut-marut. Budaya kita tenggelam oleh hiruk-pikuk komersialisme dan konsumerisme. Apa artinya kita bicara pluralisme dan multikulturalisme?

Multikulturalisme, Kebudayaan dan Referensi

Kebhinekaan etnik dan budaya bukan perkara baru dalam sejarah. Beberapa sarjana telah mengembangkan teori tentang hubungan antar-etnik, sejarah interaksi dan saling pengaruhnya dalam kebudayaan, serta konflik-konflik yang timbul karena pertemuan itu. Referensi antara lain: H. Ballock (1967) *Toward A Theory of Minority Groups Relations*. New York: Wiley and Sons. Dan juga R. Schermerborn (1970). *Comparative Ethnic Relation: A Framework for Theory and Research*. New York: Random House.

Selama lebih tiga dasawarsa multikulturalisme mulai dikenal luas di kalangan pengambil kebijakan politik, kalangan akademis, sarjana ilmu sosial dan humaniora. Ia kemudian dipilih menjadi kebijakan resmi pemerintahan Australia, Kanada dan Amerika Serikat untuk menangani perbedaan etnik yang hadir dengan kebhinekaan budaya dan agama. Referensi antara lain: L Foster dan D. Stockley (1988). *Australian Multiculturalism: A Documentary History and Critiques*. Clevedon: Multicultural.

Kebijakan resmi untuk menangani masalah sosial di Kanada dan Australia, memuat tiga pendekatan yang saling berkaitan. (1) Pendekatan demografik deskriptif, yaitu berdasar perbedaan bahasa, budaya dan etnik. Dengan pendekatan ini diperlihatkan bentuk hubungan dan diferensiasi struktural dalam masyarakat. Pengelompokan berdasar asal-usul etnik penting menyangkut partisipasinya dalam kehidupan kenegaraan dan lembaga sosial. (2) Pendekatan

normatif ideologis, pendekatan yang berkaitan dengan tindakan politik sebagai akibat dari perbedaan budaya. Pendekatan ini lazim ditujukan pada manajemen organisasi pemerintahan dalam menangani perbedaan etnik. (3) Pendekatan politik pragmatis, menyangkut hak-hak individu yang berasal dari berbagai etnik dalam kehidupan politik tanpa menanggalkan identitas kelompok atau budaya etnisnya. Referensi antara lain: Macquire (1985) *Dee Why Australia*. Melbourne: Mcquire Library.

Upaya memahami hubungan antar etnik yang berbeda budaya penting. Nasionalisme dan identitas nasional merupakan fenomena modern yang mulai diguncang. Begitu pula gagasan nation-state. Kebudayaan diartikan sebagai ciri-ciri khusus yang membentuk budaya kolektif suatu bangsa, walaupun etniknya berbeda. Negara-bangsa tidak didasarkan atas etnik, tetapi kesatuan etnik-etnik yang membentuk bersama-sama identitas nasional sebagai kesatuan kolektif. Kesatuan ini dibentuk berdasar pengalaman sejarah bersama atau persamaan nasib dalam sejarah.

Hubungan Etnisitas, Bangsa dan Nasionalisme

Memahami hubungan ini amat penting. Identitas nasional dan nasionalisme dipandang sebagai gejala modern (muncul pada abad ke-19 M) dan selalu dikaitkan dengan munculnya gagasan *nation-state*. Jika diartikan demikian, maka identitas nasional bermakna sebagai cirri-kciri budaya kolektif yang dibentuk dari berbagai etnik sebagaimana dikemukakan Gellner (1983). Anthony D. Smith (1986) mengatakan bahwa identitas nasional dan nasionalisme mempunyai akar historis yang lama dan dalam banyak hal muncul dari kelompok etnik tertentu (Persia, Cina dll.). Ia bertentangan dengan bangsa berdasar satu etnik seperti Jepang, Korea, Israel, Serbia, dll. Renan (1882) mengatakan, “Keberadaan suatu bangsa... adalah setiap hari dari plebisit”. Identitas nasional merupakan kesatuan kolektif yang dibentuk dalam sejarah oleh keseluruhan masyarakat, tetapi tidak melalui tindakan sukarela untuk mengikat diri.

Ada dua jenis identitas nasional, yang keduanya tidak mengambil bentuk murni: *pertama*, identitas nasional yang bersifat politis (seperti Indonesia) yang memiliki akar sejarah dan budaya (disebabkan factor sejarah dan politik), dan *kedua*, identitas nasional yang bersifat etnis yang memiliki dimensi politik semata-mata.

Bilamana beban komponen etnik sangat besar, maka timbul rintangan besar untuk mengatur kebhinekaan etnik dan budaya dalam suatu masyarakat. Ia mengancam kepaduan masyarakat dan rentan terhadap timbulnya konflik etnik. Tetapi, sebaliknya, identitas nasional yang didasarkan pada suatu etnik, dapat memfalsifikasi kebijakan demokratik walaupun masyarakatnya multikultural. Di situ terdapat penghormatan terhadap klaim identitas etnik dan memberikan otonomi terhadap etnik-etnik yang ada, termasuk partisipasi dan akses dalam kehidupan sosial politik, Etnik yang dominan cenderung menimbulkan situasi konflik.

Referensi tentang hal ini antara lain: Ernest Gellner (1983) *Nations and Nationalism*. Ithaca NY: Cornell University Press. Anthony D. Smith (1986) *The Ethnic Origin of Nations*. Oxford, UK: Oxford University Press. Dan Renan, Ernest (1882, 1992). *Qu'est-ce qu'une nation?* Paris: Presses Pochet.

Pro dan Kontra Multikulturalisme

Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme. Dalam sejarahnya, monokulturalisme diberi arti sebagai norma-norma yang berlaku dalam sebuah negara-bangsa (*nation-state*). Cakupannya ialah “kesatuan dan homogenitas budaya” (Eropa, Jepang). Sedangkan multikulturalisme diterapkan pada budaya dari kelompok-kelompok etnik pendatang yang hidup dalam negara modern atau negara maju dan berbeda latar belakang budayanya.

Sampai tahun 1970-an multikulturalisme dikaitkan dengan kebijakan negeri-negeri berbahasa Inggris. Setelah mengalami perdebatan lama, negara-negara Eropa seperti Denmark, Belanda, Perancis dan Jerman, akhirnya ingin kembali pada kebijakan

monokulturalisme dalam upaya memperkuat *nation-state* dan nilai-nilai Yahudi-Kristen & Yunani-Romawi yang telah mengalami sekularisasi yang memuncak pada zaman Pencerahan (*Aufklärung*) abad ke-19 M.

Penentang-penentang multikulturalisme memandang bahwa aliran ini mendorong timbulnya *ghetto-ghetto budaya* dan mengancam identitas nasional serta bangunan kehidupan negara bangsa yang telah dibina secara bersusah payah dalam masa yang lama. Di Eropa multikulturalisme malah diidentifikasi sebagai konspirasi untuk mengislamkan Eropa.

Secara rinci kritik-kritik terhadap multikulturalisme adalah sebagai berikut: Amerika Serikat dihubungkan dengan meningkatnya perkembangan politik etnis.

Kritik datang dari golongan kanan dan kiri. Perspektifnya anekaragam: Ada yang melihat dari sudut pandang individualisme liberal. Menurut kelompok yang melihat dari perspektif ini tidak semua kebudayaan non-Barat itu menerima prinsip individualisme dan liberalisme. Golongan konservatif mengkritik berdasarkan pandangan bahwa relativisme nilai-nilai yang dipropagandakan kaum multikulturalis mengancam nilai-nilai Amerika atau Anglo-Saxon yang protestan.

Ada yang melihat dari sudut pandang kesatuan nasional. Multikulturalisme bisa mendorong apa yang disebut Schlesinger sebagai "*disuniting of America*". Ayn Rand misalnya menguatirkan Balkanisasi dan multikulturalisme juga menghancurkan tatanan masyarakat industrial modern (Lihat Arthur M. Schlesinger *Disuniting of America: Reflection on a Multicultural Society*. New York: WW Katan & Company). Schlesinger mengakui aspek positif multikulturalisme, yaitu keinginan menyatukan bangsa Amerika yang penuh prasangka sejarah. Tetapi di dalamnya terdapat kecenderungan kesukuan atau pemujaan etnik secara berlebihan yang berbahaya bagi persatuan nasional.

Ayn Rand berpendapat bahwa, seperti monokulturalisme, multikulturalisme sebenarnya merupakan bentuk kolektivisme budaya yang deterministik, yaitu manusia dipandang tidak memiliki

kebebasan memilih karena ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Kolektivisme seperti ini merusak konsep *freewill* yang didasarkan pada pandangan liberalis John Locke yang menganggap jiwa manusia adalah tabula rasa. Sebagian feminis memandang bahwa terdapat banyak budaya yang anti kesetaraan gender. Kesatuan nasional juga bisa rusak oleh kebijakan multikulturalisme, karena proses asimiliasi budaya dan integrasi social terhalang. Multikulturalisme menyebabkan terjadinya fragmentasi masyarakat ke dalam faksi-faksi etnis seperti terjadi di bekas negara Yugoslavia dan negara Balkan lain.

Dalam *Illiberal Education* (1991) Dinesh D'Souza misalnya mengatakan, "Multikulturalisme merusak nilai-nilai pendidikan liberal yang didasarkan atas nilai-nilai universal Pencerahan". Ia mengancam kebudayaan Kristen tradisional.

Bryan Barry dalam *Culture and Equality* (2002) mengatakan bahwa bentuk-bentuk multikulturalisme dapat memecah-belah masyarakat, walaupun mereka itu perlu bersatu dalam memperjuangkan keadilan sosial. Golongan Marxist seperti Peter Lamborn melihat multikulturalisme sebagai agenda politik rasialisme, karena ia lebih merupakan problem ekonomi dari budaya. Tujuannya mengeksploitasi ras lain atau bangsa-bangsa non-kulit putih untuk memupuk modal di Amerika.

Eropa dan Islam

Di Eropa perdebatan tentang multikulturalisme terfokus pada Islam dan penempatannya dalam kebudayaan Barat. Mayoritas imigran berasal dari negara-negara Islam, khususnya Maroko, Aljazair dan Turki. Agama Islam menjadi simbol pengikat mereka yang kuat dalam berhadapan dengan komunitas Eropa yang sekular. Jumlah masjid bertambah banyak, sedang gereja makin berkurang. Ada pula yang mengusung masalah benturan peradaban dan melihat Islam tidak sejalan dengan demokrasi dan budaya Barat. Isu terorisme Islam yang digembar-gemborkan Bush tambah mem-

bangkitkan kecemasan terhadap bahaya multikulturalisme. Kecemasan bertambah karena kian banyaknya populasi Muslim di Eropa. Terbukanya Eropa kepada imigran Muslim terutama didorong oleh politik Eurabia yang diperkenalkan Giscard d'Estaing pada tahun 1970-an.

Di Eropa serangan terhadap multikulturalisme terutama datang dari golongan kanan. Peristiwa 11 September 2001 (serangan atas gedung WTC di New York) meningkatkan kritik mereka terhadap multikulturalisme. Tetapi yang paling lantang dikritik ialah konsep Eurabia (aliansi Eropa Arab yang digagaskan Perancis untuk membendung dominasi Amerika dalam ekonomi dan perdagangan). Bagi mereka, Islam adalah gerakan politik yang dapat disamakan dengan fasisme, yang sedang berusaha meningkatkan kontrol atas Eropa dan merusak peradaban Barat. Kritik mereka dipadukan dengan konsep Euroskepticisme militan.

Catatan

Secara umum multikulturalisme dirujuk kepada ideologi dan kebijakan di negara-negara Barat yang sebelumnya didasarkan atas identitas nasional. Tetapi di Asia, Afrika dan Amerika Latin negara-negara yang ada pada umumnya memang multikultural. Di Malaysia kebijakan multikultural ditempuh setelah konflik Melayu Cina 13 Mei 1969. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi baru untuk mengurangi kesenjangan ekonomi Cina dan Melayu. Rukun Negara, yang terdiri dari lima sila seperti Pancasila, diperkenalkan untuk memadukan berbagai etnik yang ada, khususnya tiga yang dominan: Melayu, Cina dan India (sebetulnya ketiganya bukan etnik, tetapi bangsa dari ras yang berbeda pula).

Di Indonesia pembela multikulturalisme lupa bahwa banyak etnik yang kebudayaannya terpinggirkan semenjak kolonialisme hingga negeri ini mencapai kemerdekaan, terutama kebudayaan etnik-etnik Muslim yang ekspresi budayanya, seperti kesusastraannya – khususnya kesusastraan Melayu yang khazanahnya melimpah

– tidak pernah dipandang sebagai khazanah budaya bangsa yang patut dipelajari di lembaga pendidikan dibanding ekspresi-ekspresi dari kebudayaan Jawa dan Bali, disebabkan unsur kehinduannya. Apabila para ilmuwan, birokrat, wartawan, cendikiawan, dan lain-lain bicara kebudayaan, pada umumnya mereka bicara tentang budaya politik, kesenian, bahkan tidak jarang hal yang remeh-temeh. Tak heran, generasi muda kita dewasa ini sebagian besar telah menjadi korban dari ide yang remeh-temeh. Bagaimana bisa kita menjadi bangsa yang besar? ❖

Abdul Hadi W.M. adalah seorang sastrawan Indonesia dan dosen pada Universitas Paramadina, Jakarta.